

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Julian Triadana, S.IP., S.Sos

Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : T. Dahsya K Putra, M.AP

Jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarmasin, 19 Januari 2024

Pihak Kedua,



(T. Dahsya K Putra, M.AP)

Pihak Pertama,



(Julian Triadana, S.IP., S.Sos)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

MISI	SASARAN KOMPONEN INPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	FORMULA
1	2	3	4	5	6
5	Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Layanan Perencanaan Program dan Anggaran.	Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	1	Dokumen	1.Dokumen Renja dan Renja Perubahan 2.Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKAKL) dan revisi anggaran
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan, BMN dan Ketatausahaan Kearsipan yang Akuntabel dan tepat waktu.	Jumlah Pembinaan dan Pengelolaan BMN yang sesuai dengan ketentuan	1	Laporan	1.Laporan inventarisasi aset persemester 2. Laporan SIMAK BMN persemester 3. Laporan Pembinaan (bimtek) pengelolaan BMN 4.Laporan supervise dan Monitoring pengelolaan BMN ke Kab/kota
		Jumlah Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan yang diselenggarakan	1	Dokumen	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Sumber Daya manusia Pengawas dan Kesekretariatan yang Profesional.	Jumlah kegiatan Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan	Termasuk seluruh pegawai	Orang	Jumlah orang yang mengikuti Diklat/Peningkatan Kapasitas
	Terwujudnya Sinergitas Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Melalui Kualitas Layanan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program	1	Dokumen	1.Dokumen Sakip (Rentra, RKT, Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan, Rencana Aksi, LKIP, SK-IKU) 2. Laporan Rencana Penyerapan Anggaran per Triwulan 3.Laporan Evaluasi kesesuaian kinerja sesuai dengan rencana Aksi, RKA, dan dokumen perencanaan lainnya. 4.Laporan supervise dan Monitoring pelaksanaan program ke Kab/Kota

MISI	SASARAN KOMPONEN INPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	FORMULA
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Layanan Administrasi Keuangan yang Akuntabel, Cepat dan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	1	Dokumen	1.Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara pengeluaran bulanan 2.Laporan Keuangan Semesteran
	Meningkatnya Pemenuhan Layanan Sarana Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	4	Unit	Jumlah unit pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
		Jumlah Laporan Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	10	Unit	Jumlah unit pengadaan peralatan fasilitas perkantoran
	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Gaji, Tunjangan, dan Pemeliharaan Operasional Perkantoran) yang Tepat Waktu.	Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	14	Layanan	
		Persentase penyelesaian pembayaran gaji pegawai kontrak yang tepat waktu	14	Layanan	
	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen layanan reformasi kinerja	1	Laporan	(LHKPN/LHKASN, Oenyusunan dan implementasi SOP, Zona Integritas, dan Survey Kepuasan Masyarakat)
	Prioritas Nasional	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	1	Laporan	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu
		Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu	10	Unit	Jumlah laporan Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu
		Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1	Laporan	Laporan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Program :		Anggaran :
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI	Rp 12.155.206.000,-
	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	Rp 6.182.362.000,-
	Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu	Rp 253.500.000,-
	Operasional Pengawas Ad-Hoc	Rp 5.638.540.000,-
	Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp 80.804.000,-
2.	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	Rp 8.887.708.000,-
	Layanan Reformasi Kinerja	Rp 78.580.000,-
	Layanan BMN	Rp 81.528.000,-
	Layanan Perkantoran	Rp 7.973.692.000,-
	Layanan Sarana Internal	Rp 151.000.000,-
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp 71.448.000,-
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Rp 44.880.000,-
	Layanan Manajemen Keuangan	Rp 124.212.000,-
	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu	Rp 66.280.000,-
	Layanan Manajemen SDM	Rp 296.088.000,-

Banjarmasin, 19 Januari 2024

Pihak Kedua,

(T. Dahsya K Putra, M.AP)

Pihak Pertama,

(Julian Triadana, S.IP., S.Sos)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Doddy Yulihartanto, SE, MM

Jabatan : Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : T. Dahsya K Putra, M.AP

Jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarmasin, 19 Januari 2024

Pihak Kedua,



(T. Dahsya K Putra, M.AP)

Pihak Pertama,



(Doddy Yulihartanto, SE, MM.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESIAN SENGKETA PROSES PEMILU
DAN HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

MISI	SASARAN KOMPOMEN INPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	FORMULA
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya Kualitas Penanganan Pelanggaran Pemilu atau Pemilihan yang Transparan, Cepat dan Sederhana.	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran	1	Laporan	1.Laporan pembinaan/pendampingan ke Kab.Kota semesteran 2.Laporan penyelenggaraan penanganan pelanggaran
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atau Pemilihan yang transparan, cepat dan sederhana.	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	1	Laporan	1.Laporan pembinaan/pendampingan ke Kab.Kota semesteran 2.Laporan penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses
3	Meningkatnya kualitas Layanan Bantuan Hukum dan kajian hukum.	Jumlah kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1	Laporan	1.Laporan hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum 2.Laporan supervise dan monitoring evaluasi pelaksanaan produk hukum ke Kab/kota
		Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1	Laporan	Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan (pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses
		Laporan kajian hukum	1	Laporan	Kajian untuk produk hukum dan non produk hukum
		Jumlah laporan Advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1	Laporan	Laporan Advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan
		Jumlah laporan pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	1	Laporan	Pelatihan, Sosialisasi, peningkatan kapasitas, jasa konsultan, penyelesaian kasus hukum
	Prioritas Nasional	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	1	Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu

		Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Kampanye	1	Laporan	Jumlah Laporan Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Kampanye
		Pengawasan Masa Kampanye	1	Laporan	Jumlah laporan Pengawasan Masa Kampanye
		Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Tenang	1	Laporan	Jumlah Laporan Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Tenang
		Pengawasan Masa Tenang	1	Laporan	Jumlah laporan Pengawasan Masa Tenang
		Penanganan Pelanggaran Pemungutan dan Penghitungan Suara	1	Laporan	Jumlah laporan Penanganan Pelanggaran Pemungutan dan Penghitungan Suara
		Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1	Laporan	Jumlah Laporan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
		Penanganan Pelanggaran Penetapan Hasil Pemilu	1	Laporan	Jumlah laporan Penanganan Pelanggaran Penetapan Hasil Pemilu
		Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu	1	Laporan	Jumlah Laporan Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu
		Penanganan Pelanggaran Logistik	1	Laporan	Jumlah laporan Penanganan Pelanggaran Logistik
		Pengawasan Logistik	1	Laporan	Jumlah Laporan Pengawasan Logistik

PROGRAM :		Anggaran :	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI	Rp	17.009.227.000,-
	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Rp	90.760.000,-
	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	Rp	7.320.901.000,-
	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Kampanye	Rp	1.560.000.000,-
	Pengawasan Masa Kampanye	Rp	1.151.106.000,-
	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Tenang	Rp	1.167.368.000,-
	Pengawasan Masa Tenang	Rp	264.950.000,-
	Penanganan Pelanggaran Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp	924.966.000,-
	Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp	1.134.482.000,-
	Penanganan Pelanggaran Penetapan Hasil Pemilu	Rp	492.404.000,-
	Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu	Rp	1.132.570.000,-
	Penanganan Pelanggaran Logistik	Rp	630.596.000,-
	Pengawasan Logistik	Rp	1.138.132.000,-
	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	Rp	238.288.000,-
	Layanan Hukum	Rp	111.584.000,-
	Layanan Umum	Rp	75.244.000,-
	Layanan Bantuan Hukum	Rp	51.460.000,-

Banjarmasin, 19 Januari 2024

Pihak Kedua,

(T. Dahsya K Putra, M.AP)

Pihak Pertama,

(Doddy Yulihartanto, SE, MM.)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Supriyanto Noor, SE

Jabatan : Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : T. Dahsya K Putra, M.AP

Jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarmasin, 19 Januari 2024

Pihak Kedua,



(T. Dahsya K Putra, M.AP)

Pihak Pertama,



(H. Supriyanto Noor, SE)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA BAGIAN PENGAWASAN DAN HUMAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

MISI	SASARAN KOMPOMEN INPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	FORMULA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang sesuai dengan ketentuan	Evaluasi pelaksanaan pengawasan	1	Laporan	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan
		Pengawasan pemilu partisipatif	1	Laporan	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif
		Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan	1	Laporan	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI dan Instansi terkait
		Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	1	Laporan	IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 11); - laporan triwulan
		Penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	1	Laporan	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (IDI variabel Hak Memilih & Dipilih ,Indikator Nomor 12)
		Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif	1	Daerah	Jumlah daerah yang mengembangkan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif
4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehumasan, pemberitaan dan publikasi	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi	2	Laporan	Keterbukaan informasi publik (Indikator IKU) 1. Laporan pengelolaan informasi yang dipublikasikan

					<p>dalam mendukung keterbukaan informasi publik persemester</p> <p>2. Laporan hasil evaluasi kehumasan meliputi peliputan dan dokumentasi</p> <p>3. Laporan pengelolaan web Bawaslu provinsi</p> <p>4. Laporan supervisi dan monitoring pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi ke Kab/Kota</p>
	Terwujudnya Data dan Informasi di Bawaslu yang terpadu dan terintegrasi.	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi	1	Laporan	<p>1. Laporan pengelolaan dan pengembangan PPID persemester</p> <p>2. Laporan supervisi dan monitoring pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik ke Kab/Kota</p>
	Prioritas Nasional	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	1	Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
		Pengawasan Masa Kampanye	1	Laporan	Jumlah Laporan Pengawasan Masa Kampanye
		Pengawasan Masa Tenang	1	Laporan	Jumlah laporan Pengawasan Masa Tenang
		Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1	Laporan	Jumlah laporan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
		Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu	1	Laporan	Jumlah laporan Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu

		Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	1	Laporan	Jumlah laporan Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
		Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	1	Laporan	Jumlah laporan Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
		Pengawasan Logistik	1	Laporan	Jumlah laporan Pengawasan Logistik

PROGRAM :		Anggaran :
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI	Rp. ,-
	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif	Rp. 101.880.000,-
	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Rp. 38.520.000,-
	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan	Rp. 760.359.000,-
	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	Rp. 3.852.950.000,-
	Pengawasan Masa Kampanye	Rp. 779.565.000,-
	Pengawasan Masa Tenang	Rp. 837.800.000,-
	Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp. 626.585.000,-
	Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu	Rp. 404.730.000,-
	Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Rp. 10.620.000,-
	Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Rp. 287.230.000,-
	Pengawasan Logistik	Rp. 615.965.000,-

	DUKUNGAN MANAJEMEN	Rp	240.108.000,-
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Rp.	132.214.000,-
	Layanan Data dan Informasi	Rp.	107.894.000,-

Banjarmasin, Januari 2023

Pihak Kedua,



(T. Dahsya K Putra, M.AP)

Pihak Pertama,



(H. Supriyanto Noor, SE)